

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI BANJIR DI KOTA SAMARINDA

Novan Suryadi¹

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui, memahami serta menganalisis peran pemerintah terhadap banjir di kota samarinda. Serta untuk mengetahui dan memahami apa saja upaya yang sudah atau yang telah dilakukan pemerintah dalam menanggulangi banjir di kota samarinda.

Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban bagi pemerintah dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap orang. Akan tetapi dalam mengantisipasi semua itu sebelum terjadi hingga menyebabkan kerugian materi bahkan kehilangan nyawa sekaligus. Oleh karena itu, antisipasi sejak dini sangat penting untuk lebih ditingkatkan lagi. Selain pemerintah daerah, masyarakat juga memiliki hal penting dalam berpartisipasi untuk ikut memberdayakan kehidupannya. Agar rasa aman dan antisipasi masyarakat rawan berdampak resiko bencana. Berdasarkan hal tersebut peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan Bencana alam di Kota Samarinda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam penanggulangan bencana alam di Kota Samarinda bisa dikategorikan baik, karena berdasarkan dari penuturan masyarakat yang menjadi korban bencana banjir itu sendiri. Hubungan kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko banjir juga terjalin sangat baik dengan ikut serta berpartisipasi dan aktif dalam melibatkan diri dalam persiapan dan penanganan ketika bencana.

Kata Kunci: *Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemerintah Daerah dan Penanggulangan Banjir.*

Pendahuluan

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kesadaran dan kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh masyarakat melalui kearifan lokal daerah setempat, karena mengingat wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana.

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email:

Bencana alam yang hampir setiap musim melanda Indonesia adalah banjir. Berdasarkan nilai kerugian dan frekuensi kejadian bencana banjir terlihat adanya peningkatan yang cukup berarti. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat (permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan), pembuangan sampah ke dalam sungai, pembangunan pemukiman di daerah dataran banjir sehingga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Penanggulangan bencana merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, yaitu serangkaian kegiatan penanggulangan bencana sebelum, pada saat maupun sesudah terjadinya bencana. Seringkali bencana hanya ditanggapi secara parsial oleh pemerintah. Bahkan bencana hanya ditanggapi dengan pendekatan tanggap darurat (Depkominfo, 2007: 12).

Pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi fokus rekonstruksi dan rehabilitasi dari pasca bencana. Jaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan harus segera diupayakan, hal ini untuk mengantisipasi korban yang lebih banyak. Pemulihan kondisi dari dampak bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran dan belanja negara yang memadai dan siap pakai dalam rekonstruksi dan rehabilitasi seharusnya menjadi jaminan bagi korban bencana.

Kerangka Dasar Teori

Teori Peran

Teori peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi (Sarwono, 2002). Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang actor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia mengharapkan berperilaku secara tertentu.

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono (2002:200), Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Akan tetapi biasanya dalam suatu organisasi dibentuk suatu kerja yang melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan satuan kerja tersebutlah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam melakukan berbagai kegiatan dan mengambil berbagai langkah dalam manajemen sumber daya manusia. Terdapat dua alasan kuat mengapa satuan kerja fungsional demikian perlu dibentuk. Pertama, meskipun bahwa setiap manajer yang bersangkutan disertai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan-kegiatan

lain, baik sifatnya tugas pokok maupun tugas penunjang, sehingga perhatian utamanya ditujukan kepada tanggungjawab fungsional itu. Kedua, dewasa ini manajemen sumber daya manusia mutlak perlu ditangani secara profesional oleh tenaga-tenaga spesial karena hanya dengan demikianlah manajemen sumber daya manusia yang sangat kompleks itu dapat ditangani dengan baik. (Siagian, 2001: 31).

Pengertian Pemerintah

Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011:2). Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Rasyid, 2011:13). Osborne dan Geabler yang dikutip Rasyid (2011:19), menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Konsep Pemerintah

Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat.

Demikian dengan lahirnya pemerintahan dapat memberikan pemahaman terhadap kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje dalam kutipan Hamdi (1999: 52) yang dikutip kembali Safie (2007: 13) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : pertama, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. Kedua, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para

pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan permasalahan psikologi sosial.

Tugas dan Fungsi Pemerintah

Menurut Kaufman (Thoha, 1995:101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan civil termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana

Pemerintah harus mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik.

Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah nasional merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah lokal. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah lokal sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah lokal.

Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Dalam penanganan bencana peran masyarakat menjadi elemen yang paling penting karena kekuatan pemerintah semata sangatlah kecil jika dibandingkan dengan tantangan yang begitu besar. Peran masyarakat dalam penanganan bencana dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, seperti relawan lapangan dengan menyumbangkan tenaga dengan keahlian.

Hubungan Kerjasama Pemerintah dan Masyarakat

Dalam menanggulangi bencana banjir, pemerintah daerah terkait untuk meminimalisir terjadinya banjir. Efektivitas suatu kebijakan pemerintah tidak akan berarti apabila mengenai bencana banjir dan masyarakat yang menjalankan kebijakan tersebut dari pemerintah. Pemerintah sebagai pelayan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengatasi banjir. Pemerintah harus melakukan hal-hal yang mengurangi banjir seperti, membuat waduk yang dapat menampung air hujan dan menyediakan tempat sampah agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan serta masyarakat juga harus mempunyai kesadaran untuk menjaga lingkungan. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerjasama untuk menanggulangi banjir dan melakukan penghijauan atau penanaman pohon disekitar lahan kosong.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (disingkat BNPB) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden Republik Indonesia dalam melakukan penanggulangan bencana sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. BNPB dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019.

Definisi Konsepsional

Defenisi konsepsional merupakan batasan konsep yang dipakai oleh peneliti berdasarkan dari berbagai literature yang digunakan pada bagian sub teori dan konsep. Konsep dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis menguraikan definisi konsepsional yang menyangkut judul skripsi agar mempermudah dalam memahami maksud pembasan ini. Definisi konsepsioanl dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Kota dalam Menanggulangi Banjir di Kota Samarinda adalah segala aktifitas atau kegiatan Pemerintah Kota yang melaksanakan fungsinya sebagai pemerintah dalam menanggulangi banjir di Kota Samarinda.

Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis menggunakan penelitian deksriptif kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah

survey yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.

Fokus Penelitian

Untuk memberikan suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya batasan penelitian dan fokus penelitian ini yang di operasionalkan melalui indikator, sebagai berikut :

1. Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Banjir khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir harus mempunyai kemampuan seperti :
 - a. Perencanaan dan persiapan respon bencana.
 - b. Bantuan koordinasi.
2. Kerjasama Pemerintah dengan Masyarakat dalam Menanggulangi bencana banjir.

Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang dilakukan, penulis memilih lokasi penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dan Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain :

1. Data primer adalah yang diperoleh melalui narasumber dengan melakukannya jawab/wawancara. Sesuai permasalahan diatas dan fokus penelitian maka data primer diperoleh informan sebagai berikut :
 1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
 3. Kepala Seksi Perbaikan dan Pemulihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda.
 4. Sekretaris Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda.
 5. Staf Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda
 6. Masyarakat Korban Bencana Banjir
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah diteliti.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah :

- a. Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Teknik Analisis Data

Jenis penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yaitu dengan mendiskripsikan serta menganalisis data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Analisis data yang digunakan adalah metode data deskriptif kualitatif dari Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman (dalam Sugiono 2010:247).

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Penelitian

Gambaran Umum Kelurahan Sempaja Selatan

Kelurahan Sempaja Selatan adalah salah satu Kelurahan yang terdapat di Kecamatan Samarinda Utara. Kantor Kelurahan Sempaja Selatan beralamat di Jalan Pramuka 5A Kota Samarinda.

Sejarah Singkat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda

Sejarah Lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatar belakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Pembahasan

Peran Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi Resiko Bencana Banjir di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus didasarkan pada azas atau prinsip-prinsip utama antara lain kemanusiaan, keadilan kesamaan kedudukan dalam hukum dan kepastian hukum, kebersamaan, kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penanggulangan bencana juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip praktis sebagai berikut : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas, kemitraan, pemberdayaan, non diskriminasi dan non proselitasi.

Prinsip penanggulangan bencana diatas merupakan acuan kepada Badan Penanggulangan Bencana yang di daerah, sebagaimana wawancara dengan Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda sebagai berikut.:

“Sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi saya tentunya harus tahu terlebih dahulu bagaimana prinsip organisasi yang saya pimpin, seperti bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan melihat dan mengetahui kebutuhan masyarakat.” (16 Juni 2020)

Dari pernyataan informan diatas dapat diklasifikasi bahwa posisinya sebagai Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sebelum mengambil peran dan bertindak telah sepatutnya mengetahui kekurangan dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya.

Dari keterangan diatas juga tentunya memberikan pertanyaan sejauh mana peran pemerintah dalam menata kinerja dari BPBD dan memberikan perhatian penuh dari potensi akan terjadinya bencana alam di Kota Samarinda, yaitu dengan membentuk sebuah perda yang secara spesifik membahas tentang tata cara kinerja organisasi di bidang khusus penanggulangan bencana seperti BPBD itu sendiri. Seperti pernyataan Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, sebagai berikut :

“Masalah Perda, Pemerintah Kota Samarinda sudah mengeluarkan Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja BPBD. Masalah tata kelola penanggulangan bencana, kita disini punya acuan dari pusat pada peraturan pemerintah.” (16 Juni 2020)

Dari pernyataan Kepala Seksi Pencegahan dan Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bahwa khusus di daerah Kota Samarinda sendiri tentang perda tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sudah ada, sehingga Kota Samarinda dalam menjalankan fungsi dan tata kerjanya sudah efektif. Ini tentunya menunjukkan menunjukkan pemerintah Kota Samarinda serius dalam mempersiapkan diri dalam hal menangani resiko bencana dengan membuat aturan main yang dapat memberikan

keuntungan bagi masyarakat itu sendiri dan tentunya meningkatkan antisipasi bagi pemerintah daerah.

Khusus di Kelurahan Sempaja Selatan merupakan daerah aliran sungai jadi sudah tentu dibuat tanggul alam berupa hasil kerukan. Lebih lanjut wawancara dengan Kepala Seksi Perbaikan dan Pemulihan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda, sebagai berikut :

“Pembuatan tanggul hanya dilakukan di daerah-daerah yang rawan banjir dan berada dekat dengan aliran sungai serta sudah ditentukan.”
(18 Juni 2020)

Penuturan informan diatas mengungkapkan bahwa pembuatan tanggul hanya akan dilakukan pada tempat yang sudah ditentukan walaupun dalam dalam pengerjaan tidak bisa tahan lama, tapi hal ini bisa berlaku kalau penduduknya tidak padat lagi.

Wawancara dengan Sekretaris Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda sebagai berikut :

“Yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat sederhana saja seperti cangkul, skup, dan jarring-jaring sampah, kita juga dibantu oleh personil BPBD dan dinas/terkait lainnya, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya maka menurunkan alat berat dari dinas PU.” (19 Juni 2020)

Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena banjir ada bermacam-macam kriteria kerusakan yang ditimbulkan oleh banjir. Untuk kerusakan ringan, penanganannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana. Ada juga yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk memakai alat seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan korban.

Sehubungan dengan penyebab terjadinya bencana alam yang timbulkan oleh eksploitasi hutan yang berlebihan secara illegal tanpa diikuti reboisasi juga dapat berakibat kerusakan lingkungan, banjir dan tanah longsor. Pembangunan industri dengan penerapan teknologi maju yang tidak disertai wawasan lingkungan berpotensi terhadap kerusakan lingkungan hidup (pencemaran udara dan pencemaran tanah akibat limbah yang tidak diolah). Hutan memberikan banyak manfaat dengan berbagai fungsinya antara lain sebagai pemasok oksigen, paru-paru dunia, penyeimbang lingkungan disamping dapat menghasilkan devisa. Oleh karena itu, hutan harus dikelola dengan baik dan profesional untuk kemakmuran seluruh rakyat. Jika tidak, yang terjadi adalah bencana dengan segala dampaknya seperti bencana longsor dan banjir.

Berdasarkan teori diatas, hampir sama yang di ungkapan oleh salah satu masyarakat sebagai berikut :

“Didaerah kita sudah banyak terdapat penebangan-penebangan liar serta penambangan liar seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang

tidak bertanggung jawab itu di daerah Gelatik, sehingga jika terjadi hujan tidak ada lagi tempat resapan. Penebangan itu susah ditangani karena terkait oleh masalah perut jadi tidak bisa dilakukan secara paksa karena kasian juga keluarga-keluarga mereka,”(19 Juni 2020).

Informan tersebut menjelaskan bahwa di daerah Kota Samarinda, sudah sedikit daerah resapan air, sehingga potensi kerusakan hutan sangat besar yang dapat menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor. Pemerintah daerah juga tidak bisa bertindak semena-mena karena jika para pelaku penebangan pohon liar dan penambang liar dilarang secara paksa maka otomatis akan menghilangkan mata pencaharian masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa dibalik kerusakan hutan karena eksploitasi manusia, di sisi lain juga terdapat kehidupan bagi sekelompok masyarakat tertentu. Sehingga dalam pengambilan keputusan pemerintah perlu berpikir lebih lanjut untuk menghindari terjadinya penyimpangan sosial.

Wawancara dengan salah satu masyarakat sebagai berikut :

“Jadi kami sering membersihkan saluran (parit) bersama warga lainnya agar bila terjadi hujan yang terus menerus air tidak langsung naik. Masyarakat juga menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya, tidak membuang sampah yang dapat menghambat aliran sungai, biasanya hari sabtu atau minggu diadakan gotong royong.” (19 Juni 2020).

Penulis menarik kesimpulan dari pernyataan informan tersebut yang menjelaskan tentang tugas masyarakat yang melakukan pemeliharaan agar dapat meminimalisir resiko terjadinya bencana yaitu berfungsi untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul, antisipasi yang dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana. Hal tersebut bisa dijadikan sebagai alternatif perencanaan partisipatif penanggulangan bencana kedepannya.

Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi di lapangan, penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kelurahan Sempaja Selatan Kota Samarinda dapat dikatakan terjalin dengan baik untuk itu harus ditingkatkan lagi agar hubungan yang terjalin menjadi contoh bagi yang lain.

Perlindungan terhadap masyarakat dalam pemulihan bencana sangat dibutuhkan, makanya peran pemerintah sangat dibutuhkan, mengingat pengetahuan masyarakat tentang menjaga kondisi alam agar tetap terjaga keasliannya sangat minim.

Adapun faktor penghambat dalam penanganan bencana adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pelaku penebang pohon secara besar-besaran. Dapat dilihat dari keterangan Kepala Peaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sendiri yang masih berpikir tentang harus menggunakan cara bagaimana untuk menindaki hal tersebut akan tetapi tidak merugikan pihak masyarakat apalagi mematikan pendapatan masyarakat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dari hasil dan wawancara di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Kelurahan Sempaja Selatan, maka penulis menarik sebuah kesimpulan sesuai hasil yang telah dibahas sebelumnya sebagai berikut :

1. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi resiko bencana banjir di Kelurahan Sempaja Selatan sudah baik, ini terlihat dalam peranan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penerapan prinsip-prinsip manajemen bencana yang baik, yaitu cepat dan tepat bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan. Adanya koordinasi yang baik dengan instansi/dinas terkait sebagai upaya penanggulangan bencana yang disadarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung, serta dalam penanggulangan bencana harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang.
Upaya organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), yang selalu berupaya untuk melakukan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat sebelum terjadi bencana sebagai analisis upaya yang nyata dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Samarinda.
2. Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi resiko bencana banjir sudah baik, sebagaimana diketahui masyarakat ikut berpartisipasi dalam ikut penyuluhan/sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ataupun instansi/dinas terkait lainnya, masyarakat juga ikut serta dalam menjaga lingkungan sekitar agar dapat mencegah terjadinya banjir bila hujan terus-menerus.
 1. Pemerintah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar tetap konsisten menjaga prinsip badan penanggulangan bencana.
 2. Pemerintah daerah sebaiknya membangun tanggul sekunder yaitu tanggul yang dibangun diatas bantaran sungai atau yang dibangun dibelakang tanggul primer (tanggul yang sudah ada) yang berfungsi sebagai pengamanan atau pertahanan kedua apabila tanggul primer jebol atau rusak akibat debit banjir.
 3. Pemerintah daerah segera mencari solusi bagaimana masyarakat tidak lagi melakukan penebangan pohon dan penambangan liar yang berdampak bagi masyarakat Kota Samarinda.

Daftar Pustaka

- Miftah Thoha. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta: CV Rajawali.
- Saliman Rasyid Abdul, 2011. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori Dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2013. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Syafiie, Kencana, Inu, Drs. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sondang P. Siagian, 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.